**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Latar Kehidupan K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle**
2. Kelahiran dan Pendidikan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle

K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle yang oleh masyarakat Bugis lebih akrab disapa *Gurutta* atau *Anregurutta* dilahirkan di Ujunge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo, sekitar tujuh kilometer dari Kota Sengkang pada tahun 1900. Ayahnya bernama Puang Ngati Daeng Patobo dan ibunya Puang Cendera Dewi atau Puang Cendaha. Keduanya adalah bangsawan Bugis Wajo. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Ambo Dalle, sedangkan nama Abd. Rahman diberikan oleh gurunya ketika ia memasuki sekolah agama.

Masa kecil ia belajar mengaji dan dasar-dasar agama pada ulama setempat, lalu melanjutkan ke *Volk School* dan *Holland Inland School* (HIS) di Kota Sengkang serta Sekolah Guru Syarikat Islam di Kota Makassar. Kembali dari Makassar, ia memperdalam ilmu agama pada seorang ulama Bugis yang lahir di Mekkah, Anregurutta H.M. As’ad. Ulama ini kembali ke Sengkang tahun 1928 dan membuka pengajian *halaqah* (pesantren) di masjid Jami Sengkang. Oleh gurunya tersebut, H. Abd. Rahman Ambo Dalle dipercaya sebagai asisten dalam mengelola lembaga pendidikan yang didirikan oleh Anregurutta H.M. As’ad, Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang. Dari lembaga pendidikan ini, lahir sejumlah ulama yang kelak mendirikan pesantren di berbagai tempat di Sulawesi Selatan (Syamsuddin, 1986).

1. Mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso dan Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI)

Pada hari Rabu 21 Desember 1938 K. H.Abdurrahman Ambo Dalle hijrah ke Mangkoso dan memulai pengajian perdana dengan mengambil tempat di Masjid Mangkoso. Setelah pengajian dengan sistem halaqah (*mengaji tudang*/wetonan) berlangsung selama 20 hari, tanggal 20 Zulkaidah 1357 H atau 11 Januari 1939 M dibuka tingkatan Tahdiriyah, Ibtidaiyah, I’dadiyah, dan Tsanawiyah. Madrasah atau pesantren itu itu diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso (Said, 2009: 22-23). Karena perkembangan MAI Mangkoso yang kian pesat, tanggal 07 Februari 1947 berdasarkan hasil pertemuan alim ulama di Watang Soppeng, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle mengubah MAI Mangkoso menjadi organisasi Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI) yang berpusat di Mangkoso.

Namun, tahun 1950 Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle pindah ke Pare-Pare menjalankan tugas sebagai Kadhi Mallusetasi. Sementara jabatannya sebagai Pimpinan Pesantren DDI Mangkoso telah diserahkan kepada Gurutta H.M. Amberi Said pada tanggal 01 Oktober 1949. Sejak itu, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle menetap di Pare-Pare sampai ia masuk hutan dan bergabung dengan Darul Islam pada tahun 1955 (AGH.M. Faried Wadjedy, Wawancara tanggal 11 Februari 2017).

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**
2. **Latar Belakang Bergabungnya K.H.Abd.Rahman Ambo Dalle dalam Gerakan Darul Islam**

Bergabungnya K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle diawali oleh sebuah peristiwa yang menggemparkan masyarakat Kab. Barru, Pare-Pare, Wajo, dan Sulawesi Selatan pada umumnya (Gonggong, 1992:111). Dalam suatu perjalanan dari Pare-Pare ke Makassar untuk urusan organisasi pada tanggal 18 Juli 1955, mobil yang ditumpanginya bersama beberapa santri dihadang oleh sekelompok pasukan bersenjata di Kampung Belang-Belang Kabupaten Maros. Bersama sopir dan santri yang menyertainya, ia lalu dibawa masuk hutan untuk bergabung dengan DI/TII (Syamsuddin, 1986: 65).

Masyarakat menyebut peristiwa itu sebagai penculikan atas diri K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle oleh gerilyawan DI/TII. Namun, sejarawan Anhar Gonggong menyebut peristiwa itu sebagai rekayasa dan merupakan suatu taktik dari Abdul Qahhar Mudzakkar karena hal itu sudah diatur sebelumnya (Gonggong, 1992: 111). Menurut Gonggong, sebelum peristiwa itu K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle sudah ada komunikasi melalui kurir dengan Abdul Qahhar Mudzakkar. Salah seorang santri K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle yang juga pengikut Qahhar mengatakan bahwa peristiwa itu sesungguhnya adalah suatu “penjemputan” ulama tersebut untuk menghadiri Konferensi Wanua Waru yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Akhir 1375 H atau tahun 1955. Abdul Qahar Mudzakkar memerlukan kehadiran ulama sekaliber K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle untuk membantunya merumuskan aturan-aturan kenegaraan dan keagamaan yang akan diputuskan dalam Konferensi Wanua Waru, sekaligus ikut serta menjalankannya (Sardini, wawancara 08 Februari 2017).

Sejak itu, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle ikut bergerilya bersama Abdul Qahhar Mudzakkar. Keadaan yang tidak stabil membuatnya harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Setidaknya ada sepuluh daerah yang pernah ditempati menetap K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle selama kurun waktu hampir delapan tahun (1955-1963), yaitu Gattareng Matinggi di Maros, Ranteballa, Salobulo, Bajo, dan Binturu di Luwu, Soro dan Awo di Wajo, Lambai dan Ranteangin di Kolaka Utara, dan Belawae di daerah Sidrap. Di luar daerah-daerah tersebut hanya menjadi tempat persinggahan ketika melakukan perjalanan.

1. **Peranan K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle dalam Gerakan Darul Islam**
2. Peranan dalam Bidang Pendidikan

Gerakan Darul Islam yang memperjuangkan lahirnya sebuah negara Islam yang disebut dengan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) telah merancang sebuah struktur pemerintahan yang terdiri atas berbagai departemen. Mereka yang duduk dalam struktur pemerintahan itu adalah tokoh-tokoh yang sangat terhormat dalam masyarakat, diantaranya adalah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai Menteri Pendidikan. Sebagaimana diketahui masyarakat umum, bahwa tokoh ini merupakan ulama besar sekaligus tokoh pendidikan. Lembaga pendidikan yang didirikan adalah Darud Da’wah Wal Irsyad (DDI), di samping bergerak di bidang pendidikan juga di bidang dakwah Islamiyah. Lembaga ini berpusat di Mangkoso Kab. Barru, dan sekarang ini cabangnya telah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Tokoh pendidikan lain yang tercatat sebagai pendukung perjuangan Qahhar di DI/TII adalah Ustaz Husain Achmad, Ustaz Husain Muhammad, Ustaz Abdullah, Ustaz Junaid, Ustaz Jusuf Usman, Ustaz Sattar, Ustaz Achmad Marzuki Hasan, Hasan Ridwan, Ismail Hasan, Achmad Rahiem, dan Ustaz Junaid Sulaiman (Yasin, 2014: 178)

Bergabungnya tokoh-tokoh pendidikan tersebut bukan hanya untuk menduduki jabatan tertentu, melainkan sekaligus pula sebagai pendidik atau guru pada sekolah yang didirikan gerilyawan. Pendidikan yang dijalankan Qahhar tidak terbatas pada anak yang dalam usia sekolah, melainkan juga terhadap pasukannya. Bahkan menurut keterangan dari beberapa jamaah Tariqat Khalawatiyah Samman, diantaranya Syekh H. Mahmud Yusuf, bahwa banyak diantara pasukan DI/TII yang belajar Tarikat kepada Syekh Abdul Razak dan Syekh Abu Bakar Fihrin. Syekh Abu Bakar bin Fihrin pernah dibawa oleh pasukan ke hutan selama tiga bulan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya (Yasin, 2014:179).

 Meskipun kondisi negara yang dirintis Qahhar sifatnya masih sangat darurat, perhatiannya terhadap pendidikan ternyata cukup tinggi. Sebagai negara baru yang hendak dibangun di atas negara, tentu perjuangan ini memiliki risiko yang sangat besar. Pendidikan sebagai bagian dari kebijakan negara DI/TII pada waktu itu pun dilakukan di dalam hutan-hutan atau di tempat-tempat yang dikuasai DI/TII. Peralatan pendidikan berupa alat tulis-menulis diperoleh dari sumbangan masyarakat, dan ada pula yang diperoleh dari tokoh pendidik dalam masyarakat melalui cara yang terkesan memaksa. Demikian pula, guru-guru yang diberi tugas mengajar, ada yang dlakukan sebagai wujud sumbangsih atas perjuangan DI/TII, dan ada pula yang diboyong oleh masyarakat *bottom up*. Dikatakan demikian, sebab versi eks pengikut Qahhar mengatakan bahwa guru-guru tersebut dibawa ke hutan untuk mengajar, sementara versi pihak guru mengatakan bahwa mereka itu didaulat. Kegiatan pendidikan di dalam hutan hampir terjadi di seluruh daerah di Sulawesi Selatan dan Tenggara, termask Sulawesi Barat sekarang, sebab guru-guru yang mendapat tugas dari DI/TII tersebut tersebar di seluruh wilayah tersebut (Yasin, 2014:179)

Sekolah-sekolah formal ditangani langsung oleh Jawatan Pendidikan RII, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan pendidikan atau sekolah guru. Sekolah-sekolah Darul Islam sama dengan sekolah lainnya, dengan menambah label Islam di belakangnya, seperti Sekolah Dasar Islam, SMP Islam, SMA Islam. Materi atau kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah umum ditambah materi khusus agama. Lembaga pendidikan sekaligus berfungsi sebagai lembaga dakwah dalam rangka menanamkan ideologi Darul Islam kepada peserta didiknya (Sitonda, 2013:88).

Salah seorang tenaga pengajar yang sangat besar perananya dalam menjalankan usaha pendidikan tersebut adalah K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle. Ia tidak hanya mengajar dan memberikan pengajian pada sekolah-sekolah nonformal yang dilaksanakan di masjid (semacam pesantren), tetapi juga pada sekolah-sekolah formal seperti yang disebutkan di atas, bahkan pada sekolah kader militer. Saat berada di Markas Brigade III Lereng Tjinta bersama Bahar Mattalioe di pegunungan Gattareng Matinggi pada tahun 1955, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle mengajar pada Madrasah Zu’amaa yang dibina oleh Majelis Ulama Darul Islam serta mengajar agama pada Sekolah Kepandaian Putri (SKP) yang dibina oleh Gerakan Wanita Islam (Gerwais) Darul Islam (Awaluddin, 2009: 16). Demikian juga saat K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle berada di Ranteballa dan Ulu Salu, Gunung Latimojong. Di tempat ini ia mengajar agama untuk anggota Gerakan Wanita Islam (GERWAIS) yang dipimpin Letkol Andi Haliah, istri Qahhar Mudzakkar, serta prajurit dan perwira TII yang mengikuti Pendidikan Kader Militer (PKM).

Demikian juga saat K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle berada di Kampung Soro, Wajo. Di tempat ini ia membuka pesantren jenjang pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah, SMP, dan Kulliyah Takhassus. Aktivitas sebagai pendidik tetap berlanjut ketika K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle pindah ke Bajo, Luwu. Bersama Menteri Pendidikan RII, B.S. Baranti, memimpin dan mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar (SR) sampai perguruan tinggi yang diberi nama Perguruan Tinggi Agama Islam “Al-Qasas”. Lalu pindah lagi ke Awo dan Ranteangin Sulawesi Tenggara.

1. **Peranan dalam Bidang Keagamaan**

Peristiwa “penculikan” K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle pada 18 Juli 1955 agaknya adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Abdul Qahhar Mudzakkar. Ulama besar ini sengaja didatangkan oleh pemimpin Darul Islam tersebut untuk menghadiri Konferensi Besar I Organisasi Revolusi se-Wilayah Republik Islam Indonesia Bahagian Timur di Wanua Waru atau yang lebih dikenal dengan Konprensi Wanua Waru yang berlangsung pada tahun 1955 (Said, 2013:25). Konferensi besar ini dihadiri oleh sejumlah ulama dan tokoh yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Malaysia (Mahmud Abbas, wawancara 12 Februari 2017).

Dalam Konferensi Wanua Waru atau Pertemuan Urgensi Pejuang Islam Revolusioner II (PUPIR II), Dewan Pimpinan Revolusi Islam di Wilayah Indonesia Bagian Timur berhasil menyusun Program Islam Revolusioner yang terdiri atas sepuluh pasal (Mudzakkar, 1380: 3). Dari kesepuluh Pasal Program Politik Islam Revolusioner tersebut, lima pasal memuat hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan, dan lima pasal lainnya mengatur pelaksanaan syariat Islam. Secara keseluruhan isi Program Politik Islam Revolusioner tersebut menekankan perlunya diadakan revolusi moral. Untuk keperluan itulah sehingga Qahhar Mudzakkar memerlukan tenaga sejumlah guru/ustaz dan ulama sehingga kehadiran K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle di tengah-tengah mereka merupakan sesuatu yang sudah lama dinantikan. Itulah sebabnya, salah satu keputusan dalam pertemuan itu adalah mengangkat Gurutta sebagai Ketua Dewan Haq Revolusi dengan Sekjen Ustaz Amanta (Said, 2013: 26)

Namun, jabatan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle sebagai Ketua Dewan Haq Revolusi tidak berapa lama diganti oleh K.H. Junaid Sulaiman. Ia lalu diangkat sebagai Ketua Dewan Fatwa atau Mufti dengan Sekjen Abd. Kadir (Said, 2013: 32). Sebelumnya, Dewan Fatwa Republik Islam Indonesia Bahagian Timur dijabat oleh K.H. Abd. Rahman Mattammeng, salah seorang murid K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle (Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960. Rahasia. Reg. 534). Sebagai Mufti, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle bertugas mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Republik Islam Indonesia.

1. **Peranan dalam Bidang Pemerintahan**

Selain memiliki peran yang cukup strategis dalam bidang pendidikan dan keagamaan, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle juga diberi peran dalam bidang pemerintahan. Dalam susunan pemerintahan Republik Islam Indonesia (RII) Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 1957-1959 tercantum nama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle atau Ustaz AR. Ambo Dalle dengan jabatan Deputy Perwakilan Kabinet RII merangkap Ketua Dewan Fatwa (Usman, 2010: 145-146) .

Sesungguhnya, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle merasa kurang tepat dengan tugas-tugas tersebut karena ia tidak punya jiwa, bakat, dan pengalaman dalam bidang pemerintahan. Selama ini bidangnya adalah pendidikan dan dakwah. Karena itu, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle meminta kepada Abdul Qahhar Mudzakkar selaku pemimpin tertinggi Darul Islam di Wilayah Bagian Timur agar ia dicarikan pengganti untuk jabatan tersebut. Namun, Qahhar tetap menginginkan K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan Darul Islam.

Tahun 1960 – 1961 Perwakilan Kabinet Presiden dipimpin oleh Abdurrahman Ambo Dalle dan dibantu oleh tiga belas Perwakilan Kementerian dan empat pejabat setingkat kementerian serta dua kepala staf angkatan (Yusrie dalam Bakti, 2014:337)

Selanjutnya, dalam Konferensi PUPIR III (Pertemuan Urgentie Pedjuang Islam Revolussioner ke-III) tanggal 14 Mei 1962 di Awo (dekat Siwa, Wajo), Abdul Qahhar Mudzakkar merumuskan konsepsi yang baru, yaitu berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) dan mengangkat K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle sebagai Menteri Pendidikan Kabinet RPII (Gonggong, 1992: 202).

Tampaknya, itulah jabatan terakhir yang disandang oleh K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle dalam Gerakan Darul Islam. Tidak lama sesudah itu, ia bersama santri-santrinya ditemukan oleh pasukan TNI Batalyon 403 di bawah pimpinan Andi Patonangi yang sedang melancarkan Operasi Kilat (Said, 2013: 68)

1. **Dampak Keberadaan K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle dalam Gerakan Darul Islam bagi Kehidupan Keagamaan Masyarakat di Sulawesi Selatan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pergolakan bersenjata pasti menimbulkan korban, terutama masyarakat sipil. Selama ini, berbagai referensi yang kita jumpai cukup banyak menggambarkan sisi kelam dan dampak buruk dari konflik bersenjata tersebut. Namun, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa sebenarnya di balik berbagai dampak buruk tersebut, terdapat dampak positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek keagamaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Berbagai dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. **Aspek Pendidikan**

Keberadaan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle bersama sejumlah ulama lain dalam wilayah kekuasaan DI/TII, membuat mereka memiliki akses menjangkau daerah-daerah pelosok. Sebelumnya, masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan. Dengan kehadiran para ulama tersebut, apalagi ditopang oleh kekuasaan DI/TII membuat para penduduk tersebut bisa belajar langsung pada K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle dan ulama lainnya, baik melalui lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintahan Darul Islam, maupun lewat pengajian yang dilaksanakan oleh K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle yang dilaksanakan tanpa mengenal tempat dan waktu.

Bahkan, ketika K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle keluar dari hutan pada tahun 1963, banyak warga masyarakat atau anak-anak mereka yang ikut ke kota dan melanjutkan pendidikan pada pesantren DDI, baik yang ada di Pare-Pare, maupun yang ada di Mangkoso. Beberapa dari mereka adalah Prof. Dr. H.M. Yusrie Abady, Peneliti Senior pada Balai Litbang Kemenag Pusat dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Drs. K.H. Mahmud Abbas (Pimpinan Perguruan DDI Cabang Galesong Baru Makassar), Drs.K.H. Amirullah Husain (Pimpinan Pondok Pesantren Addariyah DDI Cabang Sudiang Makassar), Drs. K.H. Jafar Sanusi (Mantan Ketua MUI Kab. Pinrang), K.H. B. Sardini (Pengurus DPP IMMIM), dan lain-lain.

Selain itu, pengembangan madrasah-madrasah DDI di berbagai daerah, khususnya di daerah pedalaman juga tidak lepas dari pengaruh keberadaan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle di tempat tersebut pada era pergolakan DI/TII. Di daerah Tanete Riaja, misalnya, terdapat dua madrasah DDI di Kampung Lajoangin dan Waruwue yang letaknya di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Bone. Demikian juga di Desa Gattareng yang terletak di wilayah pegunungan Kab. Barru yang berbatasan dengan Kab. Pangkep, Bone, dan Maros, terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah DDI. Hal yang sama juga bisa dijumpai di Kab. Soppeng, seperti adanya Madrasah DDI di Citta dan Walimpong (Bagian Data dan Dokumentasi DDI Mangkoso).

1. **Aspek Dakwah dan Syiar Islam**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan gerakan Darul Islam adalah terlaksananya ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Bab V Pasal 18 – 24 Piagam Makalua yang merupakan Konstitusi Negara Republik Islam Indonesia. Dalam Pasal 18 mewajibkan setiap anggota tentara, polisi, GII, pemerintah, dan rakjat untuk menjalankan salat lima waktu dan puasa Ramadhan. Bagi yang mengabaikan shalat lima waktu wajib dan puasa wajib tanpa uzur akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Pasal 19 berisi larangan untuk melakukan atau mendukung perbuatan terlarang, seperti perjudian, perampokan, dan kejahatan lainnya dalam masyarakat. Pelaku atas pelanggaran tersebut akan ditangkap dan *diconsigneer* dalam “*war cams*” (kamp tawanan perang gurillah), dan jika mereka membantah atau memberontak boleh dibunuh.

Sedangkan mengenai pelaksanaan hukum syariat lainnya hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Dewan Pemerintahan Territorium /Perwakilan Kabinet Presiden RII, seperti pelaksanaan salat tarwih, larangan semua perbuatan bidah, dan segala hal yang terkait masalah syariat/ibadah. Setiap alim ulama dan cendekiawan diperintahkan untuk bersatu padu dalam pelaksanaan syariat tersebut dan yang menolak akan diperangi (Sitonda, 2013:160)

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di daerah pedalaman yang umumnya merupakan wilayah kekuasaan Darul Islam. Umumnya masyarakat di pedalaman belum memahami ajaran Islam dengan baik, bahkan masih banyak diantaranya yang baru memeluk Islam setelah daerahnya dikuasai oleh Darul Islam. Kondisi ini menyebabkan para ustaz dan alim ulama yang tergabung dalam Darul Islam harus bekerja keras menyiarkan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat yang tingkat pemahamannya masih sangat rendah. Sebenarnya, menurut penuturan seorang muridnya di hutan, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle punya peluang dan kesempatan untuk masuk kota kapan ia berkeinginan, tanpa harus menjalani kehidupan di hutan selama delapan tahun. Tetapi, setelah melihat kondisi keberagamaan masyarakat di pedalaman, jiwa keulamaannya terpanggil untuk memperbaiki. Ia tidak sampai hati meninggalkan masyarakat dalam kondisi beragama seperti itu. Apalagi dalam menjalankan dakwah tersebut, K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle ditopang oleh kekuasaan dan jabatan yang melekat pada dirinya sehingga ia memiliki akses untuk menjangkau daerah-daerah pelosok yang terpencil, bahkan di puncak gunung.

Selain itu, kehadiran K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle sebagai seorang ulama Ahlussunnah Waljamaah yang bermazhab Syafi dapat menjadi penyeimbang dalam penyebaran faham keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui, faham keagamaan yang dikembangkan oleh Abdul Qahhar Mudzakkar dan ulama-ulama yang sefaham dengannya cenderung beraliran Wahabi (Sitonda, 2013: 159).

Salah satu faktor sehingga K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle bisa menjadi penyeimbang adalah keteguhannya dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan, meski berada di lingkungan yang berbeda dengan dirinya. Ibarat ikan, ia tidak menjadi asin meski berada di lautan yang bergaram. Sebagai orang Bugis, ia memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang diwarisi dari leluhurnya di Tanah Wajo. Sifat *Getteng*, *Lempu*, *Warani,* dan *Reso* telah melekat pada dirinya dan senantiasa tercermin dalam setiap tutur dan perilakunya. Nilai kearifan lokal itu berpadu dengan sifat keikhlasan, pengabdian tanpa pamrih, dan totalitas sehingga dengan nilai-nilai itu ia bisa sukses melewati setiap era dalam kehidupannya.

Dampak lain yang tak kalah pentingnya adalah K.H.Abd. Rahman Ambo Dalle bersama tokoh-tokoh lain dalam Gerakan Darul Islam telah menjadi salah satu kekuatan yang bisa menangkal masuk dan berkembangnya faham komunis di Sulawesi Selatan karena saat itu ajaran komunis sudah mulai merember masuk, khususnya di kalangan militer dan pemerintahan.